



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SINTA PUSPITASARI
2. Jabatan : KEPALA BIRO TATA USAHA DAN DUKUNGAN PIMPINAN
3. NHK : 860338

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.461.385.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA UTARA , Rp. 2.343.135.000
2. Tanah Seluas 2.330 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.
1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , Rp. 863.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/30 m2 di KAB / KOTA
LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/43 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
6. Tanah Seluas 779 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp.
150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **165.000.000**

1. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **561.564.300**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **498.806.500**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **541.672.079**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 1.152.604.244

Sub Total

Rp. 8.381.032.123

III. HUTANG

Rp. 1.102.502.242

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.278.529.881

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.